

BEBERAPA ASPEK DIMENSI NILAI AKSIOLOGIS MAX SCHELER DAN RELEVANSINYA PADA PRAXIS INTER-FAITH

Roma Ulinnuha*

Abstract

Based on what accentuated by Max Scheler on axiological dimension, this article seeks to explore what aspects discussed in the axiological values and the relevance of the values on interfaith initiatives. The ever-present issues of conflict, radicalization and religiously-motivated violence has led the idea on how to approach some ways toward the alternative solution. The queries are what is axiological dimension of values in Scheler's perspective? and what is the relevance of the values on interfaith realm in religious studies perspective? The study shows that the axiological dimension consisting of the values that needed to be found objectively as the ethical basis for human interaction in everyday life. In Scheler's view, human without values is absurd; one needs moral values in order to live a meaningful life. The essence of values is present with or without human's practice. The relevance of the value is profound in interfaith realm since it forms human identity and determines peaceful coexistence among people of different faiths.

Keywords: aksiologi, Scheler, relevansi, *Interfaith*, *Religious Studies*

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas keterkaitan dimensi filosofis dan kajian agama dalam konteks aktivisme *interfaith*.¹ Secara fungsional, dengan doktrin yang terkandung di dalam agama, maka ia dapat membawa perdamaian, keadilan, keamanan dan kesejahteraan, tetapi di sisi lain agama juga menjadi sumber perpecahan, kerusakan kekerasan dan konflik. Dengan demikian, agama secara esoterik mengandung doktrin yang menyatukan manusia dan peradaban, namun di sisi eksoteriknya, agama menjadi sebuah pemisah dengan

¹ Artikel hasil seleksi LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini telah melalui revisi artikel mencakup judul dan kerangka teoritis dengan substansi tema yang sama. Terima kasih pada program BOPTN tahun 2015 yang telah memberikan sejumlah dukungan penelitian dalam skema riset LP2M UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

pengelompokan yang berpengaruh pada peradaban.² Berpijak pada nilai-nilai agama dan kerap kali dipakai oleh sementara penganut agama untuk bekerja bersama-sama meminimalkan pola-pola kekerasan, salah satu hal yang penting dalam konteks ini adalah pendidikan dan penanaman nilai-nilai.³ Hal ini ditambah pula dengan kondisi berupa mobilitas sosial yang terkait pula dengan mekanisme efektif untuk menangani, mengatur dan menyelesaikan setiap konflik serta kondisi menuju damai⁴. Kajian aspek filosofis dan nilai-nilai tercermin misalnya, pada penelitian Fadhilah yang merumuskan perpektif aksiologis terhadap Pancasila, ideologi bangsa Indonesia, yang menyuguhkan kritik terhadap pandangan relatif nilai Max Scheler.⁵ Sedangkan artikel ini mengintegrasikan bagaimana nilai-nilai dipandang secara filosofis dalam konteks aksiologis, dengan tantangan sinergitas *interfaith* dewasa ini. Pertama-tama, beberapa tantangan zamani terkait studi agama akan dipaparkan, selanjutnya bagaimana pandangan Scheler terhadap nilai serta bagaimana relevansinya dalam konteks *interfaith*.

Seiring dengan pengaruh globalisasi, masyarakat secara umum mengalami tantangan zamani terkait dengan isu terpusat pada dimensi persoalan sosial, ekonomi dan politik. Persoalan yang dapat diamati adalah apakah masyarakat dalam konteks pemaknaan keberagamaannya akan terkait dengan masalah sosial-keagamaan lainnya seperti halnya isu-isu gender, etnisitas, suku bangsa dan seksualitas, seperti yang disampaikan oleh K. Anthony Appiah. Keterkaitan tersebut menyangkut apakah termasuk pada faktor-faktor yang heterogen seperti nilai-nilai dan pertimbangan manusia dalam tindakan sosial-keagamaannya, sementara di sisi lain, terkait dengan ruang dan waktu, terdapat pernyataan yang merujuk peringatan bahwa “...*makes us careful not to assume that what goes for one goes for the others*”.⁶ Fenomena keterbukaan dan tantangan

² Suparman Jayadi, *Beragama untuk Kemanusiaan dan Kebangsaan* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2016), 42.

³ Kees De Jong, “Religious Peace Education as a Means to avert Threats to Religious Harmony,” dalam Carl Sterkens, Muhammad Machasin, Frans Wijzen (eds.), *Religion, Civil Society and Conflict in Indonesia* (Zurich: LIT, 2009), 162.

⁴ Anak Agung Banyu Perwita dan Nabilla Sabban, *Kajian Konflik dan Perdamaian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 38.

⁵ Fadhilah Unisma, “Pancasila dalam Perspektif Aksiologi dan Tantangannya di Era Reformasi dan Globalisasi di Indonesia,” *Paradigma* 10, 1 (2009), 86.

⁶ K. Anthony Appiah, “Identity, Authenticity, Survival: Multicultural Societies and Social Reproduction” dalam Amy Gutmann, *Multiculturalism: Examining The Politics of Recognition* (New Jersey: Princeton, 1994), 151.

masyarakat tersebut adalah khas persoalan masyarakat modern dengan kecenderungan mengalami eskalasi yang ditandai dengan industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan mobilitas sosial dan partisipasi politik. Masyarakat beragama dalam konteks ini akan berkenaan pula dengan dimensi sosial-keagamaan serta membutuhkan perspektif filosofis apa yang dapat memberikan kontribusi pemikiran pada persoalan antar entitas agama dan kepercayaan.

Dengan berpijak pada persoalan empirik di masyarakat yang partikular, maka seperti yang disitir dari Anthony Giddens bahwa “...*the intensification of worldwide social relation which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa...*”. Intensifikasi relasi sosial menghubungkan dimensi lokal yang beragam, di mana peristiwa lokal dapat terbentuk dari kejadian-kejadian dalam konteks jarak yang berjauhan, demikian pula sebaliknya.⁷ Tambahan lagi, seperti yang disampaikan oleh pemerhati soal masyarakat dan agama, bahwa ternyata perubahan-perubahan budaya dan sosial yang terus terjadi, tidak akan menihilkan signifikansi kajian sosial-keagamaan, namun lebih menjadi suatu keadaan yang memungkinkan pengembangan keilmuan.⁸ Sementara bentuk-bentuk keprihatinan mendalam atas konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia, telah dan akan berkaitan pula dengan aspek-aspek agama, yang seringkali dipinjam untuk alat-alat dan dalih kekerasan antar entitas. Hal ini mengingatkan pada pemaparan relasi agama dan realitas yakni apa yang disebut oleh Djohan Effendi tentang agama, cita-cita dan realita.⁹

Persoalan tentang agama, konflik dan budaya bukanlah topik yang menyenangkan untuk dibicarakan. Topik pembicaraan ini mengingatkan pada berbagai peristiwa yang terjadi di negeri ini, berbagai peristiwa yang memalukan sekaligus memilukan. Sebuah topik yang selama ini membuat kita menegelsingelus dada, menyaksikan betapa masyarakat kita seolah-olah telah kehilangan akal sehat dan diganti oleh emosi kemarahan dan kebencian satu sama lain.¹⁰

⁷ Abdul Rashid Moten, “Modernization and the Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses” dalam K.S. Nathan dan M.H. Kamali, *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century* (Singapura: ISEAS, 2005), 232.

⁸ Alan Aldridge, *Religion in The Contemporary World: A Sociological Introduction* (Cambridge: Polity Press, 2003), 215.

⁹ Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan Beragama* (Yogyakarta: DIAN/Interfidei, 2013), 16.

¹⁰ Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan*, 15.

Pertanyaan di atas lebih mengemuka lagi jika harapan akan kedatangan zaman baru belum pula menunjukkan dampaknya. Ketika nilai-nilai demokrasi mulai dihayati dan ketika masyarakat sipil mulai memperoleh kesempatan yang selama beberapa dasa warsa tertekan untuk mengembangkan kehidupan bangsa kita dalam bernegara, apakah benar-benar memberikan masa depan kita yang lebih baik. Fenomena di atas memperlihatkan betapa agama-agama seolah-olah mengalami kemandulan dalam mencegah kemerebakan budaya kekerasan yang diliputi brutalisme, dan dalam perspektif yang lebih luas hal itu menunjukkan kegagalan agama-agama memberikan jawaban positif pada harapan banyak orang ketika berbagai ideologi dianggap gagal membentuk tata dunia yang lebih baik dan manusiawi.¹¹

Dalam konteks kehidupan beragama, fenomena di atas lebih memprihatinkan lagi karena ia muncul setelah agama-agama mengalami apa yang disebut sebagai masa kebangkitan kembali. Anggapan selama ini bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius agaknya sudah kehilangan dasar untuk mempertahankannya. Anggapan semacam itu sudah tidak relevan lagi. Bagaimana mungkin agama-agama yang mengajarkan nilai kemanusiaan dan peradaban melahirkan para pemeluknya yang seolah-olah tidak lagi mengenal nilai-nilai kemanusiaan.¹²

Tentu saja semua pemuka agama sepakat bahwa budaya kekerasan dan tindakan-tindakan bengis itu tidak sesuai dengan ajaran agama apapun. Harus dibedakan antara ajaran-ajaran agama yang luhur dengan perilaku penganut-penganutnya yang tidak mengindahkan moral. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa hal-hal itu bisa terjadi justru ketika agama-agama mengalami kebangkitan dan kesemarakannya.¹³

Di sisi lain, pendidikan agama sejak puluhan tahun diberikan di sekolah-sekolah sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Radio dan televisi setidaknya setiap pagi memprogramkan kuliah subuh. Khotbah-khotbah keagamaan diberikan di berbagai kesempatan oleh berbagai kalangan, remaja, pemuda, perempuan dan orang-orang dewasa umumnya. Perayaan hari-hari besar keagamaan dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang menyita banyak biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Rumah-rumah ibadah bermunculan bukan hanya indah tapi juga mewah. Tapi mengapa muncul tindakan-tindakan kekerasan yang semakin membudaya. Mengapa muncul gagasan untuk

¹¹ Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan*, 16.

¹² Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan*, 16.

¹³ Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan*, 17.

menghidupkan kembali pendidikan budi pekerti, sebuah gagasan yang secara tidak langsung menuduh dan menuding bahwa agama telah gagal membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, insan yang mempunyai al-akhlakul-karimah.¹⁴

Mengenai harapan dan realitas, Effendi memaparkan bahwa ternyata kenyataan sangat jauh dari harapan. Misalnya, salah satu gejala yang mewarnai masa reformasi di Indonesia adalah justru terjadi konflik sosial bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) di berbagai tempat. Makin merebak karena memang konflik itu sudah terjadi dalam berbagai kerusuhan sosial di sana sini di masa Orde Baru masih berkuasa. Karena itu tidak mengherankan apabila penguasa Orde Baru menekan potensi konflik itu seketat mungkin agar tidak meledak dengan menekan isu-isu SARA.¹⁵

Ketika di masa reformasi kemampuan menekan itu jauh sangat berkurang maka konflik-konflik horizontal bernuansa SARA-pun sangat mudah meledak dan merebak. Kepulauan Ambon, Maluku Utara, Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah adalah titik-titik di mana konflik sosial yang berskala cukup besar terjadi dan menjadi tontonan masyarakat dunia. Masih ada lagi konflik-konflik sosial yang bisa disebutkan, yang sifatnya lebih kecil dan sebagian dapat lebih cepat diatasi seperti yang pernah terjadi di Kupang, Batam, beberapa tempat di pesisir utara Jawa seperti Indramayu, Pekalongan dan Pati. Selain itu juga tawuran antar siswa, antar kampung dan antar suku yang tidak jarang membawa korban harta benda dan bahkan nyawa manusia.¹⁶

Mengapa selanjutnya manusia memerlukan nilai-nilai adalah karena salah satunya konflik-konflik sosial itu sekaligus menandai munculnya budaya kekerasan. Bahkan bukan hanya sekedar kekerasan tetapi juga sadisme, kekejaman dan kebengisan yang tidak pantas dilakukan. Memancung kepala orang yang tak berdaya, menenteng-nentengnya dengan tertawa bangga, membakar orang hidup-hidup hanya karena pencurian kecil dapat dimengerti kalau hal itu terjadi dalam dunia yang masih belum mengenal peradaban.¹⁷

Masyarakat kita seakan-akan tidak lagi percaya pada hukum sebagai salah satu pilar masyarakat modern dan beradab. Sementara kalangan dengan mudah menjadi hakim sendiri yang biasanya disertai oleh tindak kekerasan dan kekejaman. Ironisnya, hal itu benar-benar terjadi di negeri zaman modern

¹⁴ Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan*, 17.

¹⁵ Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan*, 17.

¹⁶ Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan*, 18.

¹⁷ Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan*, 18-19.

yang konon berketuhanan dan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Sekaligus sebuah negeri yang penduduknya dikenal religius. Pemaparan tersebut menjadi tantangan serius bagi para pemuka agama agar ajaran-ajaran agama yang menekankan nilai-nilai kasih sayang, damai dan tiada kekerasan serta tentang kemanjuran ajaran-ajaran agama untuk mengobati penyakit-penyakit masyarakat kita tidak dianggap sebagai retorika kosong.¹⁸

Keterlibatan aspek-aspek dimensi nilai dengan demikian perlu dikedepankan mengingat pelbagai persoalan sosial yang kerap kali terjadi terjadi tersebut beranjak pula dari nilai-nilai. Nilai-nilai yang mendasari tindakan manusia tentu dilatari dengan berbagai pertimbangan. Jika pertimbangan suatu tindakan berdasar pada nilai-nilai purposif tertentu, maka pada saat yang sama manusia dapat memilah dan memilih aspek-aspek yang dipercaya tidak memberikan potensi kerugian.

Pada bagian dimensi nilai dan tindakan nanti, persoalan dalam bentuk apakah manusia mempercayai nilai, apakah nilai tersebut di ciptakan atau ditemukan dan bagaimana status nilai itu sendiri jika banyak yang tidak mengindahkannya akan dibahas. Sementara di sisi lainnya, persoalan-persoalan yang mengemuka dalam tataran konflik dan kekerasan tetap terus saja terjadi dalam sejarah kemanusiaan.

Selanjutnya, dalam relasi antar agama dan antar masyarakat di satu wilayah tertentu, misalnya, konteks globalisasi baik langsung maupun tidak, memberikan imbasnya terhadap persoalan sosial-keagamaan. Walaupun seperti disampaikan oleh sementara pengamat sosial, bahwa globalisasi sebagai terma, belum memiliki definisi yang mapan, namun secara praxis sudah tampak benar adanya. Secara akademis, dengan definisi kerja (*working definition*) globalisasi tersebut, tentu sangat tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai proses sosial, proses sejarah, maupun proses alamiah. Namun yang pasti adalah fenomena tersebut akan membawa seluruh bangsa dan negara semakin terikat satu dengan lainnya, antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat.¹⁹

John Kelsay dan Summer B. Twiss menggarisbawahi ide bahwa jika banyak orang menganggap agama merupakan sesuatu yang bukan saja perekat

¹⁸ Djohan Effendi, *Pluralisme dan Kebebasan*, 19.

¹⁹ Sri Rejeki Merdekawaty, *Globalisasi yang tak Terkendali* (Sukoharjo: Hamudha Prima Media, 2010), 3.

antara suatu komunitas dunia pada umumnya, tetapi juga berkait erat dengan emosi-emosi dalam individu dan kelompok, maka dimensi konflik dalam agama adalah sesuatu yang esensial. Andaikan juga agama merupakan suatu cantelan dan klaim bagi penindasan dan simbol yang menyebabkan antar entitas berperang, tentu hal ini adalah dinamika tersendiri. Karena itulah, seperti yang disampaikan oleh Kelsay dan Twiss, momentum untuk dialog antara dinamika konflik agama dengan realitas sosial perlu diciptakan yang pada akhirnya dapat dipahami secara jelas mengapa agama dapat menjadi “berkat” atau memobilisasi kekuatan dari tradisi-tradisi agama yang mengasihi, menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan.²⁰ Sementara itu, di sisi yang lain, konteks dan rentang kepentingan dan kelompok dalam masyarakat yang plural tersebut sangat bervariasi, mulai dari masalah ekonomi hingga masalah politik dan keamanan, di mana pernyataan tersebut mampu memberikan contoh pembahasan persoalan agama berciri multisektoral.²¹

Pada konteks relasi sosial-keagamaan di masyarakat, khususnya bagaimana antar umat beragama bersikap terhadap diri dan entitas lainnya, beberapa gagasan aksiologis dapat menjabarkan alternatif tindakan dan nilai-nilai apa yang dapat diamati dan dipilih. Artikel singkat ini akan menjelaskan pertama-tama, apa yang dimaksud dengan gagasan aksiologis menurut Max Scheler, kemudian beberapa persoalan dan tantangan interfaith serta relevansi dimensi aksiologis pada ranah interfaith. Beberapa hal tentang nilai dan konsekuensi tindakan sosial manusia dengan demikian dapat dirunut berdasar pada pilihan-pilihan nilai. Apakah nilai yang dilaksanakan tersebut merupakan sebuah kewajiban atau semata karena nilai yang terkandung pada tindakan tersebut yang menentukan penilaian manusia. Permasalahan tersebut dapat diketahui dengan penjabaran nilai aksiologis Scheler dan relevansinya pada inisiatif interfaith dalam konteks praxis.

B. Relasi Dimensi Nilai Aksiologis, Interfaith dan Multikulturalisme

Pertama-tama, penelitian ini menjelaskan aspek dimensi aksiologis Max Scheler. Berlatar pada kebutuhan akan pertautan antara nilai dan tindakan, aspek ini akan terkait dengan prinsip apa yang dipercaya oleh sebagian

²⁰ John Kelsay dan Sumner B. Twiss, *Agama dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Interfidei, 2007)

²¹ M. Amin Abdullah, “Memutus Mata Rantai Kekerasan antar-Umat Beragama” dalam Robert B. Baaowollo, *Menggugat Tanggungjawab Agama-agama Abrahamik bagi Perdamaian Dunia* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 99.

masyarakat dan inspirasi. Tentang aspek kerjasama dan komunikasi antar entitas misalnya, bukan tidak mungkin dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat lainnya. Namun hal yang perlu dicermati benar adalah bahwa apa yang dapat diaplikasikan di sebagian masyarakat dan lainnya tersebut, tidak memberikan jaminan kecocokan atau kesesuaian apabila diterapkan dalam masyarakat yang partikular. Di atas semua itu, kemungkinan memikirkan lagi tentang bagaimana masyarakat dapat menerapkan pedoman dasar tersebut dalam konteks budayanya sendiri, tentu adalah pertimbangan yang berharga.

Pertama, Max Scheler berpijak pada nilai-nilai etika aksiologis di mana manusia tidak dapat hidup tanpa nilai. Nilai, sebagai suatu sifat atau kualitas yang membuat sesuatu berharga, layak dingini atau dikehendaki, dipuji, dihormati, dan dijunjung tinggi, pantas dicari, diupayakan dan dicita-citakan perwujudannya, merupakan pemandu dan pengarah hidup sebagai manusia. Berdasarkan sistem nilai yang kita miliki dan kita anut pula kita memilih tindakan mana yang perlu dan bahkan wajib kita lakukan dan mana yang perlu dan wajib kita hindarkan. Sistem nilai juga memberi arah, tujuan dan makna pada diri dan keseluruhan hidup kita. Dengan kata lain, berdasarkan sistem nilai yang kita miliki dan dalam kenyataan kita hayati, akhirnya kita membentuk identitas diri kita sebagai manusia dan bahkan menentukan nasib keabadian kita.²²

Scheler membedakan antara pembawa atau yang menghadirkan nilai serta nilai itu sendiri. Misalnya, nilai keindahan kita kenali dari hal atau benda yang indah yang membawa atau menghadirkan nilai keindahan tersebut. Tetapi keduanya tidak sama. Pembawa nilai bersifat empiris dan dapat berubah-ubah, tetapi nilai sendiri bersifat apriori (artinya sudah ada dan diandaikan sebelum dialami) dan tetap. Dalam konteks moral, nilai kejujuran, misalnya, akan tetap berlaku kendati banyak orang dalam kenyataan secara empiris berlaku tidak jujur. Nilai persahabatan tetap merupakan suatu nilai yang layak dikejar perwujudannya dan tidak dihapuskan atau diubah oleh fakta adanya ketidaksetiaan atau bahkan pengkhianatan antara orang-orang yang bersahabat. Penilaian atau pandangan dan anggapan orang tentang sesuatu dapat berbeda-beda dan berubah-ubah, tetapi itu tidak berarti bahwa nilai yang terkandung atau dibawa oleh sesuatu itu juga berbeda-beda dan berubah-ubah.²³

Dalam konteks ruang-waktu, memang nilai tidak berada dalam ruang abstrak maupun sebagai objek dalam ruang dan waktu, tetapi menjadi nyata dalam tindakan subjek yang membuka diri dalam kesadarannya yang terarah

²² Paulus Wahana, *Nilai: Etika Aksiologis Max Scheler* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 5.

²³ Paulus Wahana, *Nilai: Etika Aksiologis*, 7.

pada nilai-nilai tersebut. Tanpa keterlibatan aktif subjek, nilai yang sesungguhnya ada secara objektif itu tidak menjadi nyata secara subjektif. Bagi Max Scheler, nilai-nilai itu tidak menjadi nyata secara subjektif dengan pertama-tama dipikirkan atau melalui kegiatan kognitif, tetapi dengan dirasakan dalam keterbukaan hati yang mencintai. Menurut Scheler, perasaan akan nilai yang bersifat intensional secara intuitif mengenali adanya nilai senang-tidak senang, vital, rohani dan transendental atau yang profan.²⁴

Secara khusus, Scheler berpendapat bahwa dalam hubungannya dengan manusia, manusia tidak menciptakan nilai, melainkan menemukan nilai yang telah ada secara objektif sebelumnya. Lalu, *resentimen* adalah sikap yang membuat kita buta terhadap nilai, yang meracuni jiwa. *Resentimen* merusak keterbukaan manusia terhadap nilai, segala penilaiannya terkena distorsi; apa pun dicurigai, apa pun diartikan secara negatif. Dengan demikian, *resentimen* dapat mengacau kemampuan manusia yang bersangkutan untuk dapat menangkap nilai secara objektif. Nilai memiliki peranan sebagai yang memberikan arah dan daya tarik bagi manusia untuk membangun dan membentuk kehidupan person melalui tindakan-tindakannya. Walaupun tidak ada jaminan kesamaan antara intuisi Scheler dengan intuisi lainnya tentang nilai, nilai-nilai yang telah terwujud dalam model-model person dapat menjadi daya tarik bagi orang yang mampu menangkapnya untuk mencontoh dan mewujudkan dalam kehidupannya. Nilai, ternyata memiliki daya yang tidak kecil bagi kehidupan manusia, yaitu menjadi dasar kewajiban manusia untuk bertingkah laku; nilai mengarahkan serta menggerakkan kehidupan manusia untuk mewujudkan dan membentuk dirinya melalui tindakan-tindakannya.²⁵

Kedua, dalam konteks *interfaith*, aspek nilai berelasi pula dengan keragaman kultural. Masing-masing kebudayaan, menurut Bhikhu Parekh, memiliki keterbatasan sehingga penganut multikulturalis menganggap bahwa keanekaragaman kultural menjadi suatu kebaikan moral yang penting, dan manusia tidak hanya membutuhkan kebudayaan yang kental dan kaya untuk mendewasakan, selain juga memberi akses pada pihak liyan. Parekh selanjutnya memaparkan bahwa setiap kebudayaan membentuk jangkauan terbatas emosi dan kapasitas manusia, dan banyak mengorbankan hal-hal berharga dalam mencapai karakteristik bentuk dari kecemerlangannya.²⁶

²⁴ Paulus Wahana, *Nilai: Etika Aksiologis*, 7-8.

²⁵ Paulus Wahana, *Nilai: Etika Aksiologis*, 101-103.

²⁶ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 457.

Tentang upaya yang harus dikedepankan, Parekh menyebutkan aspek dialog simpatik yang kritis dengan kebudayaan lain, kita menghargai kekuatan dan keterbatasan kita sendiri, menjadi sadar akan apa yang membedakan dirinya seperti halnya apa yang dimiliki secara bersama, dan menikmati kesempatan untuk memperkaya kesadaran kita sendiri dengan meminjam secara bijaksana bagian-bagian mereka yang menarik. Bentuk dialognya tidak hanya dalam lisan, namun juga mencakup sikap tingkah laku, dilafalkan tidak hanya dalam argumen namun juga dalam penyatuan perasaan yang tidak sadar, dan terjadi tidak hanya di antara para ahli filsafat dan penulis kreatif tapi juga dalam pertemuan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan biasa.²⁷

Parekh selanjutnya menitikberatkan pada aspek, di mana individu dan komunitas dapat mendidik dan “mengadabkan” satu dengan lainnya dengan cara yang halus, asalkan, tentu saja, mereka tidak terlalu dogmatis dan merasa suci untuk mendekati orang lain dengan pikiran terbuka. Multikulturalis, menurut Parekh, menghargai pertukaran antar budaya dan penyatuan dalam tingkat level tertentu, mengusulkan kebijakan dan struktur kelembagaan yang berguna bagi mereka, dan mengharapkan negara untuk memainkan peran yang bijaksana dan mendukung.²⁸

Tentang posisi multikulturalis, Parekh mempercayai konsep interaksionis daripada pandangan multikulturalisme lainnya yang statis dan sempit. Dalam konteks ini, bagi mereka, hal ini melibatkan bukan sebuah kebersamaan kebudayaan dan komunitas kultural yang pasif dan membisu, melainkan keterlibatan aktif satu sama lain. Inilah mengapa, menurut Parekh, mereka akan menekankan dialog antarbudaya dan menjadikannya suatu prinsip mengaktifkan dan bahkan mempelopori masyarakat multikultur.²⁹

Lebih lanjut tentang prinsip multikulturalisme, Parekh memberi peringatan bahwa masyarakat yang multikultur bukan harus memaksa atau bahkan menekan komunitas kulturalnya untuk ikut serta secara aktif terlibat dengan masyarakat yang lain, karena kita harus menghormati pilihan mereka dan menghargai pengalaman dan rasa takut historis yang akan menghalangi mereka untuk menjadi terbuka. Tetapi hal itu berarti bahwa kita harus mencoba menciptakan kondisi di mana tidak ada masyarakat yang merasa dikepung, ditakut-takuti, dan diasingkan dari masyarakat yang lebih luas sehingga tidak memiliki kepercayaan dan kerelaan untuk mengambil bagian dalam percakapan

²⁷ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 458.

²⁸ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 458.

²⁹ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 458.

antarbudaya berkelanjutan yang membentuk darah kehidupan masyarakat multikultur dan dihadapi semua jenis masyarakat.³⁰

C. Relevansi Nilai Aksiologis Scheler pada Dimensi Interfaith

Beranjak dari pengamatan pada konflik-konflik yang terjadi, dapat dipastikan bahwa beberapa argumen mempercayai bahwa ada keterlibatan dimensi agama di situ. Para pemuka agama khususnya dan umat beragama pada umumnya, kerap kali menampik tuduhan bahwa dimensi agama mengada di sementara konflik. Sementara di sisi lain, banyak yang mempertanyakan bagaimana agama dapat memberikan respon. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah nilai-nilai yang diyakini – dan dapat ditemukan pada agama-agama Dunia, mulai Islam, Kristen, Protestan, Budha, Hindu, KonghuChu dan seterusnya – oleh pemeluk-pemeluk agama dan menjadi sumber-sumber nilai universal itu mengalami degradasi? Apakah di masa depan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan seperti kasih sayang, disiplin, toleran dan inklusif itu menjadi kurang maknanya seiring dengan tindak penyelewengan tindakan manusia terhadap penafian nilai-nilai? Apakah nilai itu menjadi tidak berguna bagi manusia dan kemanusiaan? Apakah kerjasama dan saling pengertian antar pemeluk agama dalam dimensi interfaith itu tidak lagi mempunyai dasar pijakan tindakan aktifisme yang berasal dari derivasi nilai?

Dimensi aksiologis mensyaratkan terjalannya eksistensi nilai dengan praktek maupun tidak dengan disertai tindakan karena sifat nilai yang apriori. Penegasan nilai menurut Scheler ini tentu saja mengandung relatifitas. Namun penekanan Scheler pada nilai aksiologis ini merujuk pada aspek inspirasi yang cukup kuat. Terlebih dalam kasus dekonstruksi konflik dan kekerasan, nilai aksiologis Scheler dapat dipakai sebagai penegas kebulatan tindakan manusia termasuk dalam dimensi interfaith.

Beberapa aspek yang relevan dari nilai aksiologis Scheler pada aktifisme interfaith menyangkut hal-hal berikut ini, dimulai dengan nilai sebagai pemandu. Scheler mempercayai bahwa nilai dapat memberikan arah yang cukup berarti mengingatkan manusia berada pada tingkat-tingkat keterbatasan. Dalam konteks outcome peredam konflik yang terus menerus terjadi dan kerap kali bersinggungan dengan aspek dan entitas agama, nilai yang sebagian didapatkan dari inspirasi ajaran-ajaran agama yang majemuk, tentu bagi para pemeluknya berperan cukup berarti. Klaim-klaim nilai dengan demikian dapat bersifat

³⁰ Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism*, 458.

mengumpulkan pelbagai dimensi nilai agama-agama. Pada tataran aktifisme sosial keagamaan yang melibatkan banyak pemeluk agama-agama, maka nilai-nilai yang diyakini masing-masing pemeluk agama tersebut dapat mengerucutkan fokus tindakan-tindakan sosial seperti masa-masa bencana alam, program amal, pengentasan kemiskinan dan akses pendidikan.

Praxis interfaith yang berhasil tentu akan merupakan tindakan sinergitas dalam konteks tindakan sosial keagamaan secara langsung dengan masyarakat sebagai subyek. Dengan demikian, nilai dan sistem nilai bukan lah bersifat pasif, namun masyarakat sebagai subyek akan membentuk pola pikir kebersamaan. Pola pikir kebersamaan dengan tanggungjawab pengembalian nilai-nilai dari masing-masing penganut agama-agama itu secara alamiah membentuk identitas nilai. Identitas nilai ini, menurut hemat saya, menjadi tidak eksklusif dengan pertimbangan kemajemukan komponen umat beragama. Pencandra nilai ini adalah nilai-nilai agama-agama yang dipercayai oleh penganut-penganutnya secara universal.

Setiap institusi termasuk lembaga, komunitas dan organisasi tentu akan menghadapi beberapa tantangan baik dari internal maupun dari luar. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pandangan Scheler adalah sifat apriori nilai dan resentment. Berpijak dari ciri nilai menurut Scheler yang tidak berubah, sebaliknya hanya pemberi definisi nilai menyangkut aktor-aktor saja yang sebenarnya berubah karena sifat empiriknya, seringkali nilai dinafikan. Penafian nilai-nilai yang berlangsung terus menerus dan jangka waktu yang tidak singkat tersebut berdampak pada sementara kalangan untuk tidak lagi mengindahkan nilai, atau meminjam istilah Scheler, menjadi entitas yang buta nilai atau sikap resentment. Sikap ini dalam praxis interfaith yang beragam, menjadi kendala yang perlu diatasi oleh segenap pihak yang terlibat dalam kegiatan interfaith. Sikap saling meminimalkan tindakan-tindakan dogmatis yang mengarah pada sikap saling mencurigai dan berpikiran negatif tentu dapat amat membantu. Di samping itu, keinginan kuat untuk klarifikasi terhadap pihak-pihak yang belum mendapatkan kejelasan pada tindakan yang diasumsikan negatif dan rasa ingin saling membantu dapat merupakan aspek yang membahagiakan dalam konteks interfaith.

Selain tantangan yang niscaya, salah satu aspek yang relevan dari pandangan nilai Scheler untuk keberlangsungan interfaith adalah model-model person serta contoh tindakan. Masyarakat yang tergabung dalam aktifisme interfaith tentu berlatar beragam yang kaya akan model. Para pemuka agama dan tetua masyarakat, menurut nilai dan model person yang dipercayai Scheler,

menjadi aset yang cukup insipratif. Tindakan para tokoh dan pemuka agama tersebut menjadi model-model. Para pemuka agama dengan nilai santun, ramah dan kasih sayang, atau menurut Scheler, keterbukaan hati yang mencinta, tentu pada saat-saat tertentu menjadi amat dirindukan dan mensinergikan mana-mana yang transenden dan yang profan. Contoh tindakan yang menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, mampu bersanding dengan penuh ketulusan di tengah-tengah perbedaan, serta mau bersigerak untuk aktifitas sosial tentu merupakan aspek yang menyejukkan untuk setiap pemeluk agama. Pada saat yang menentukan ketika harus memilih, maka model dan contoh tindakan ini akan memunculkan nilai dan tindakan mana yang perlu, menurut Scheler, dan bahkan wajib kita lakukan dan mana yang perlu dan wajib kita hindarkan.

Dengan relevansi aspek nilai menurut Scheler tersebut, identitas kemajemukan nilai menjadi nyata dan terwujud di antara para pemeluk agama yang pluralistik. Identitas tersebut, dipercayai Scheler, akan mendorong manusia menemukan jati dirinya sendiri untuk bertindak kebaikan dan kebajikan di dunia untuk keabadian. Dalam konteks interfaith di Indonesia, identitas kemajemukan untuk sinergi kegiatan interfaith akan menegaskan lebih kuat dimensi Bhinneka Tunggal Ikha dalam masyarakat Pancasila. Tantangan akan selalu dan tetap mengada, maka penilaian atau pandangan dan anggapan orang tentang sesuatu dapat berbeda-beda dan berubah-ubah itu menjadi niscaya. Dalam pandangan Scheler, untungnya, perbedaan dan pergeseran pandangan terhadap nilai tersebut tidak berarti bahwa nilai yang terkandung atau dibawa oleh sesuatu itu juga berbeda-beda dan berubah-ubah.

Konflik yang terus mengada dapat dirunut salah satu faktor pemicunya dari sikap resentimen. Scheler berpendapat bahwa dalam hubungannya dengan nilai dan manusia, resentimen merusak keterbukaan manusia terhadap nilai, karena sikap kecurigaan dan negatif. Konflik yang merebak di Indonesia dalam dimensi horizontal yang memilukan karena menyinggung dan melibatkan agama di situ, lebih karena banyak pihak menjadi tidak rela dengan menangkap nilai secara objektif. Yang kerakpali muncul adalah etnosentrisme, regionalisme dan eksklusifisme beragama.

Pandangan Scheler yang relevan untuk praksis interfaith tersebut berkelindan dengan aspek keterbatasan, dialog simpatik, pertukaran budaya dan kebebasan. Tokoh multikulturalis Bhikhu Parekh misalnya, menyadari bahwa setiap entitas penuh dengan vitalitas dan potensi yang khas namun juga terbatas sifatnya. Dialog simpatik yang dimaksud Parekh tentu menopang apa yang disampaikan oleh Scheler tentang contoh tindakan. Kasih yang terbuka

menurut Scheler bermuara sama dengan apa yang disebut-sebut Parekh sebagai pertukaran budaya dengan sarat nilai didalamnya. Pada gilirannya, aspek kebebasan yang disampaikan Parekh bermakna tidak berbeda dengan apa yang dipercayai oleh Scheler sebagai pilihan-pilihan tindakan atas nilai yang manusia beragama yakini. Di konteks kegiatan interfaith di Indonesia, semua pihak dapat mengedepankan nilai-nilai adiluhung khas nusantara, baik yang bersumber dari ajaran-ajaran dan doktrinal agama maupun nilai-nilai kultural-kemasyarakatan yang distingtif. Banyak entitas di luar Indonesia yang memberikan apresiasi untuk nilai-nilai agama yang meruang dengan nilai-nilai publik di Indonesia. Jika memang relevansi nilai Scheler ini dipercayai dengan setulus hati, maka setiap entitas interfaith telah menemukan salah satu landasan tindakan-tindakan aktifisme berbasis nilai.

D. Penutup

Gagasan nilai menurut Scheler didasarkan pada dimensi filosofis bahwa manusia membutuhkan nilai-nilai untuk mempertahankan kehidupan. Nilai-nilai dapat saja bersumber dari agama-agama maupun kultural-kemasyarakatan, menurut Scheler, namun status nilai bersifat tetap. Di dalam nilai itu sendiri, yang mengalami perubahan dan pergeseran adalah pandangan-pandangan subjektif aktor-aktor yang memberikan makna atas nilai. Jika pandangan atas nilai itu bermuatan kecurigaan dan kenegatifan, maka Scheler merujuknya pada sikap resentimen atau buta nilai. Pada titik inilah Scheler dapat mengurai mengapa konflik dan kekerasan bersifat selalu dan terus mengada.

Relevansi gagasan nilai Scheler dalam praxis interfaith dapat ditemukan pada prinsip nilai sebagai inspirasi dengan tawaran model-model beserta dimensi tindakan. Dengan demikian, sikap kecurigaan antar entitas yang berujung pada sikap negatif bukanlah menjadi penghalang utama karena sifat nilai yang apriori. Entitas dan aktor-aktor bersikap negatif itulah sebenarnya yang perlu memperbaiki diri, bukan pada persoalan nilai-nilai. Dalam konteks ini, dialog yang mutualistik-interaksionistik, seperti disampaikan Parekh, tentu merupakan aspek yang melegakan banyak pihak. Pada konteks kegiatan inter-faith di Indonesia, yang melibatkan tidak saja agama-agama besar –Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghuchu, namun juga agama-agama lokal dan kepercayaan, nilai-nilai Scheler meruang dengan prinsip keteladanan dan inspirasi Bhinneka Tungga Ikha dalam konteks negara Pancasila yang menjamin sinergitas antar pemeluk umat beragama untuk tujuan nir- kekerasan dan perdamaian.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. "Memutus Mata Rantai Kekerasan antar-Umat Beragama" dalam Robert B. Baawollo. *Menggugat Tanggungjawab Agama-agama Abrahamik bagi Perdamaian Dunia*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Aldridge, Alan. *Religion in The Contemporary World: A Sociological Introduction*. Cambridge: Polity Press, 2003.
- Appiah, K. Anthony. "Identity, Authenticity, Survival: Multicultural Societies and Social Reproduction" dalam Amy Gutmann. *Multiculturalism: Examining The Politics Of Recognition*. New Jersey: Princeton, 1994.
- De Jong, Kees. "Religious Peace Education as a Means to avert Threats to Religious Harmony," dalam Carl Sterkens, Muhammad Machasin, Frans Wijzen (eds.), *Religion, Civil Society and Conflict in Indonesia*. Zurich: LIT, 2009.
- Effendi, Djohan. *Pluralisme dan Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: DIAN/ Interfidei, 2013.
- Jayadi, Suparman. *Beragama untuk Kemanusiaan dan Kebangsaan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2016.
- Kelsay, John dan Sumner B. Twiss. *Agama dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Interfidei, 2007.
- Merdekawaty, Sri Rejeki. *Globalisasi yang tak Terbandung*. Sukoharjo: Hamudha Prima Media, 2010.
- Moten, Abdul Rashid. "Modernization and the Process of Globalization: The Muslim Experience and Responses" dalam K.S. Nathan dan M.H. Kamali. *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21st Century*. Singapura: ISEAS, 2005.
- Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Nabilla Sabban. *Kajian Konflik dan Perdamaian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Unisma, Fadhilah. "Pancasila Dalam Perspektif Aksiologi Dan Tantangannya Di Era Reformasi dan Globalisasi Di Indonesia," *Paradigma*, Vol. 10, No.1. 2009.
- Wahana, Paulus. *Nilai: Etika Aksiologis Max Scheler*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- **Dr. Roma Ulinnuha, S.S., M.Hum.**, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Email: romaulinnuha@yahoo.com